

Sistem Online PMB, Belum Mampu Dijangkau Seluruh Lapisan Masyarakat

Oleh: Citta Maya

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Denpasar 2025 telah berakhir Kamis 17 Juli. Namun hingga kini banyak yang belum puas dengan hasilnya. Bahkan diproyeksikan ada banyak warga Denpasar yang tak mendapat sekolah negeri karena jumlah lulusan SD ber-KK Denpasar tahun 2025 sebanyak 9.383 siswa, sedangkan daya tampung SMP Negeri hanya 5.880 kursi. Meski demikian, masih ada 74 sekolah swasta yang siap menampung. Pemerintah Kota Denpasar juga sudah menyiapkan subsidi sebesar Rp1,5 juta per siswa untuk yang bersekolah di sekolah swasta.

Secara agregat, segala hal terkait SPMB, semuanya telah dihitung dan disiapkan anggarannya. Namun sejak dibuka pendaftaran SMP jalur prestasi pada 7 Juli, dilanjutkan tanggal 10 dan 11 dibuka jalur afirmasi dan mutasi, serta tanggal 14 dibuka untuk jalur domisili, implementasinya tak sederhana yang telah dirancang. Banyak hal spesifik yang kerap memicu perselisihan.

Sistem dan petunjuk teknis (juknis) telah terbangun sedemikian rupa. Namun tetap saja ada yang lepas dari jangkauan. Contoh kasus, siswa miskin yang tak memiliki ayah di Banjar Batukandik, Padangsambian Kaja. Saat usia 12-13 tahun, seorang anak tak akan mampu memenuhi dokumen afirmasi yang dibutuhkan. Apalagi dengan kondisi ibu yang tak cukup memiliki pendidikan untuk memahami sistem tersebut. Bahkan dapat dibayangkan untuk mendaftar online saja sesuai juknis, tak akan mampu. Meski pihak sekolah asal dapat memberikan pendampingan untuk melakukan pendaftaran, namun pemenuhan berkasnya juga membutuhkan proses. Rasanya proses tersebut tak akan selesai jika tak ada pendampingan.

Seperti Surat Pengantar Layanan (SPL) yang bisa didapat di Dinas Sosial. Belum lagi jika ada masalah pada KK anak tersebut. Masyarakat miskin atau yang berada pada desil 1-5, mungkin saja kesulitan memenuhi hak anaknya untuk memiliki identitas seperti akta kelahiran dan pembaharuan KK.

Ketidaktahuan informasi akibat tak terjamah sosialisasi SPMB menyebabkan pengurusan administrasi kependudukan menjadi kendala saat melamar ke sekolah tujuan. Pasalnya salah satu syarat juknis untuk jalur domisili adalah harus memiliki KK Denpasar. Kalaupun ada perpindahan domisili, maka paling lambat perubahan KK dilakukan Juni 2024, setahun sebelum SPMB 2025 dilaksanakan.

Maka dari itu, sebelum sistem penerimaan murid baru dibuka, hendaknya pemerintah telah memiliki data warga miskin ber-KK Denpasar yang akan mendaftar ke sekolah negeri. Dimulai dari tingkat banjar atau dusun perlu melakukan penyisiran terhadap warganya yang akan melamar sekolah. Sehingga ketika waktunya tiba, murid tersebut telah mampu menyiapkan dokumen. Dengan demikian, kegagalan pendaftaran dapat diantisipasi sejak awal.

Sistem yang digadang-gadang akan memberikan transparansi dan keadilan bagi masyarakat, nyatanya hanya menjadi aturan main bagi murid dan orang tua yang mapan secara ekonomi dan pendidikan, namun belum menyentuh masyarakat miskin, tak berpendidikan. Padahal mereka hanya ingin bersekolah di sekolah negeri yang katanya gratis. Hal ini membenarkan pandangan banyak pihak bahwa pendidikan memang sangat sulit dicapai bagi masyarakat miskin.

Tahun 2024, berdasarkan data Kemenko PMK, ada 7.275 KK Denpasar yang masuk desil 1, belum lagi desil 2, 3, 4 dan 5. Dengan angka ini, pemerintah semestinya memiliki gambaran sistem penerimaan murid baru yang tepat agar dapat menjangkau dan melayani masyarakat kota. Dengan demikian dapat diantisipasi dengan melakukan penyisiran lebih awal ke setiap dusun agar semua masyarakat di lapisan terbawah dapat terlayani pendidikannya. Tak hanya sekedar imbauan atau sosialisasi acak tapi juga penyisiran berlapis.

Selain jalur afirmasi, jalur prestasi juga menyisakan ganjalan. Misalnya saja prestasi pada cabang olahraga renang. Meskipun anak tersebut memenangkan medali emas berjenjang dari tingkat kecamatan, kota hingga provinsi, namun tetap akan kalah jika tidak sesuai dengan kebutuhan prestasi yang dicari sekolah tujuan. Karena saingannya berada pada kejuaraan yang sama, memenangkan medali yang sama, namun hanya berbeda kategori renang yaitu gaya dada dan punggung.

Hal spesifik semacam ini yang kerap membuat orang tua murid tidak puas. Karena merasa anaknya telah berjuang mengharumkan nama daerahnya, namun hingga waktunya tiba, perjuangan tersebut terasa tak dihargai.

Pada kondisi seperti itu, masyarakat tak bisa semena-mena menyalahkan pihak sekolah karena telah melaksanakan seleksi sesuai juknis. Diawali dengan mengumpulkan lamaran murid berdasarkan kategori jenis prestasi, kemudian melakukan pembobotan nilai prestasi hingga menentukan antara kebutuhan dan ketersediaan pembina di sekolah tersebut.

Jalur prestasi agaknya menuntut orang tua murid jeli melihat peluang. Masalahnya, orang tua yang memiliki anak berprestasi cenderung mendaftarkan anaknya pada sekolah- sekolah favorit. Sekolah favorit yang kerap menjadi tujuan murid berprestasi yakni SMPN 1, 3 dan 6. Hal ini pun membuat sekolah cukup kewalahan dan betul- betul menimang murid paling berprestasi dan dibutuhkan diantara murid berprestasi lainnya.

Walau demikian, jerih payah pemerintah Kota Denpasar membangun sistem penerimaan murid baru yang transparan dan adil patut diacungi jempol. Ke depan hendaknya sistem penerimaan siswa juga memikirkan tingkat keterjangkauannya bagi seluruh lapisan masyarakat dengan kondisi ekonomi, sosial, tingkat pendidikan yang majemuk.